



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA



OPTIMALISASI MANAJEMEN RANTAI PASOK DAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN

Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas
Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Republik Indonesia



Solo, 18 Juni 2025





- 1 **LINGKUNGAN STRATEGIS**
- 2 **RANTAI PASOK & KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**
- 3 **SISTEM LOGISTIK PANGAN NASIONAL**
- 4 **GREEN AND SMART PORT (GSP)**
- 5 **DUKUNGAN INFRASTRUKTUR**
- 6 **PENUTUP**

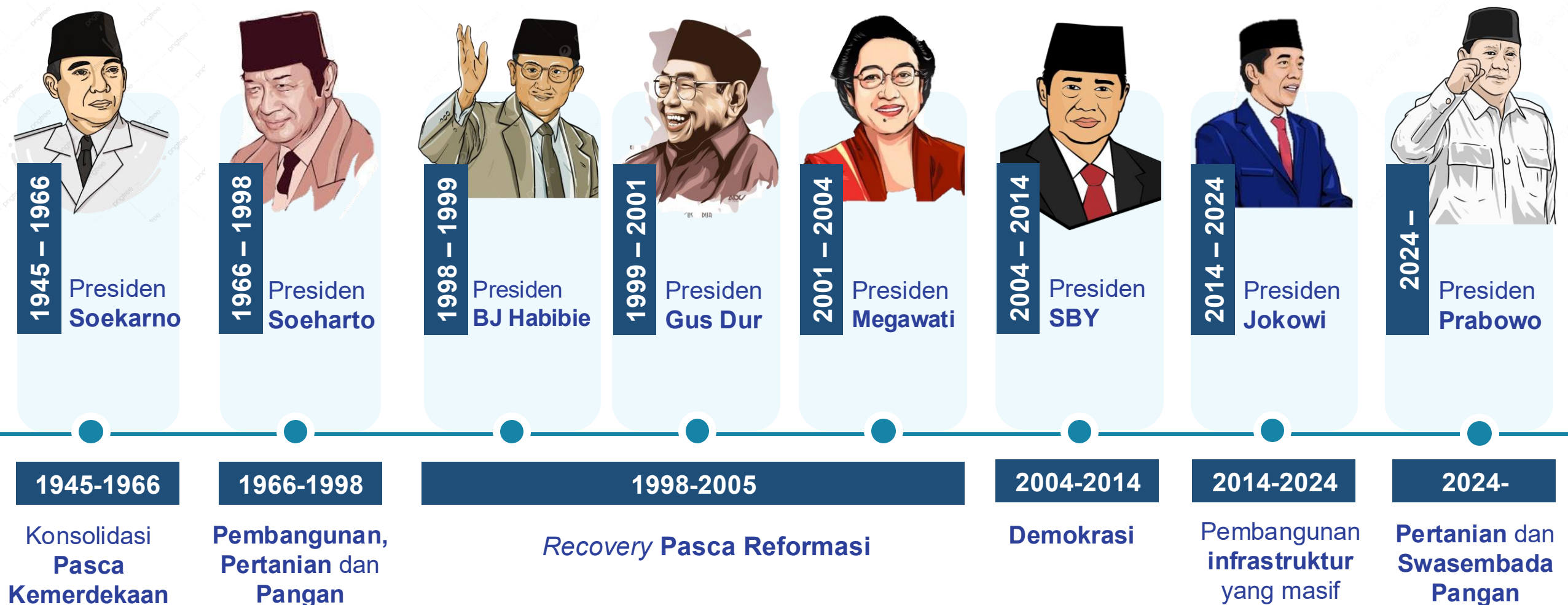


1 LINGKUNGAN STRATEGIS SEKTOR PANGAN DAN PERTANIAN





PERTANIAN DAN PANGAN KINI MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMERINTAH



Dalam 26 tahun terakhir, **pertanian dan pangan** belum menjadi prioritas utama Pemerintah

1. Peningkatan jumlah penduduk & Urbanisasi

Kebutuhan meningkat, Konsumen tersentralisasi, kekurangan TK pertanian.

2. Perubahan Pola Konsumsi

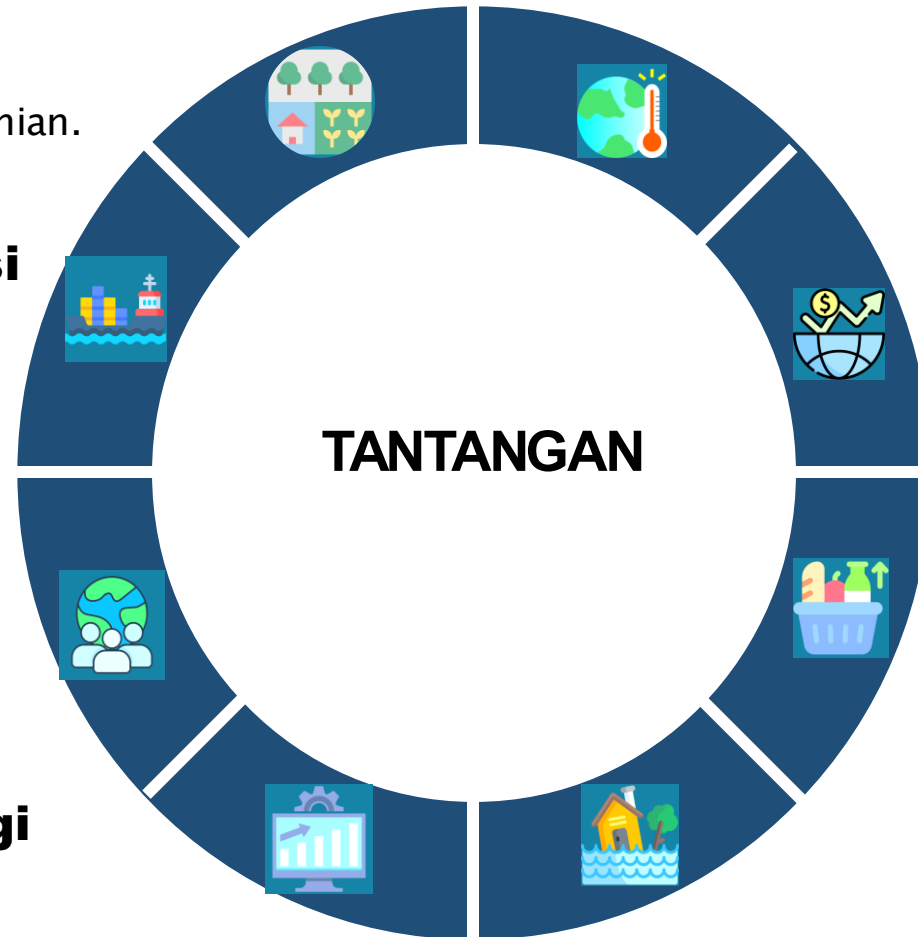
Diversifikasi & olahan pangan

3. Keterjangkauan Distribusi Pangan

Stabilitas harga dan mahal.

4. Persaingan Kebutuhan Pangan, Industri & Energi

Laju peningkatan kebutuhan



5. Perubahan Iklim

Kekeringan/Kebanjiran/ Fenomena Alam □ gagal panen.

6. Krisis Ekonomi Global dan Konflik Sosial

- Nilai tukar rupiah
- Biaya produksi
- Pelemahan ekspor

7. Keberlanjutan Lingkungan

Emisi GRK dan Sampah

8. Alih Fungsi Lahan

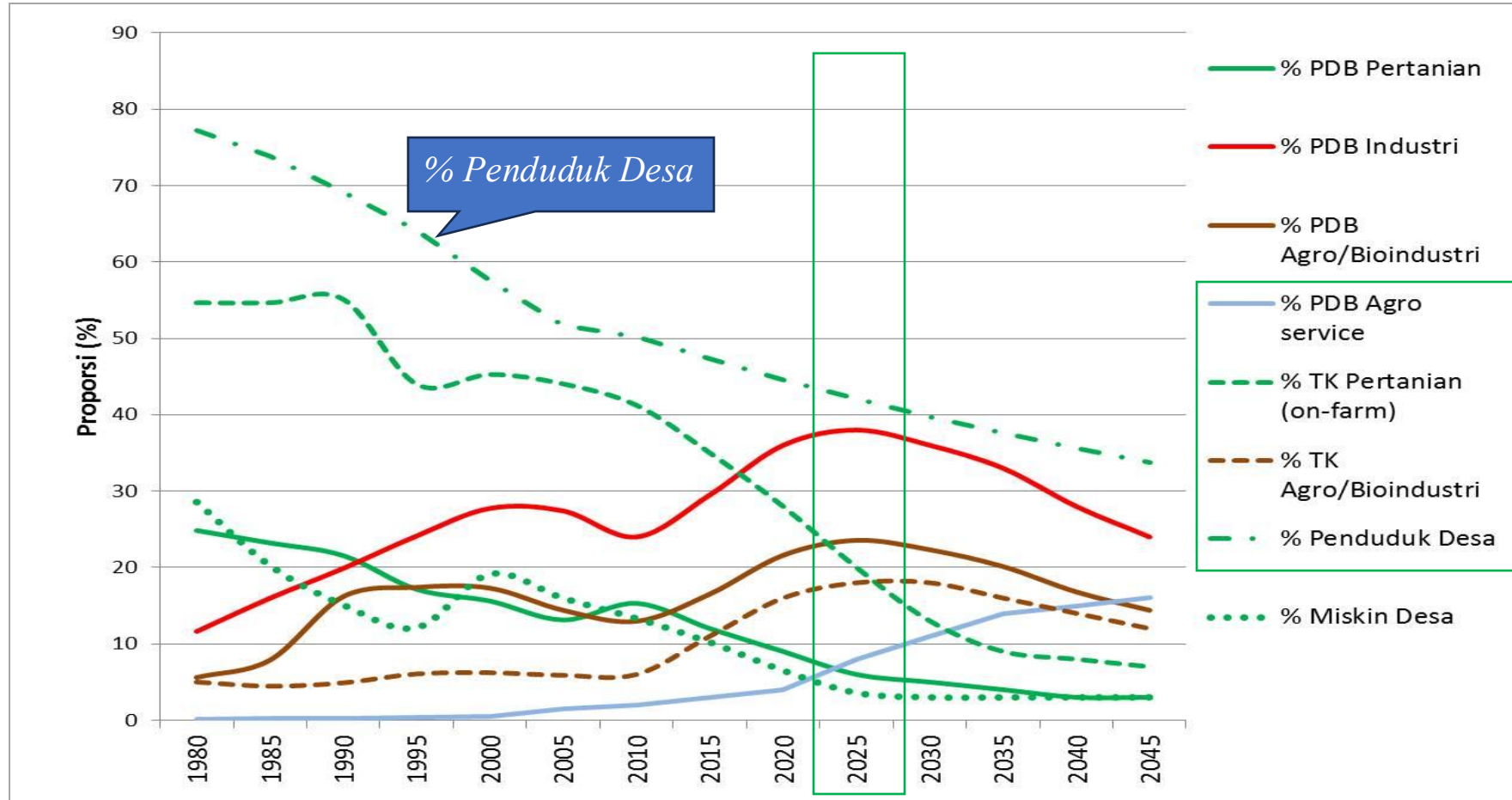
Laju $\pm$ 100 rb ha/tahun

9. Perkembangan Teknologi dan SDM

Literasi dan adaptasi teknologi, dan SDM



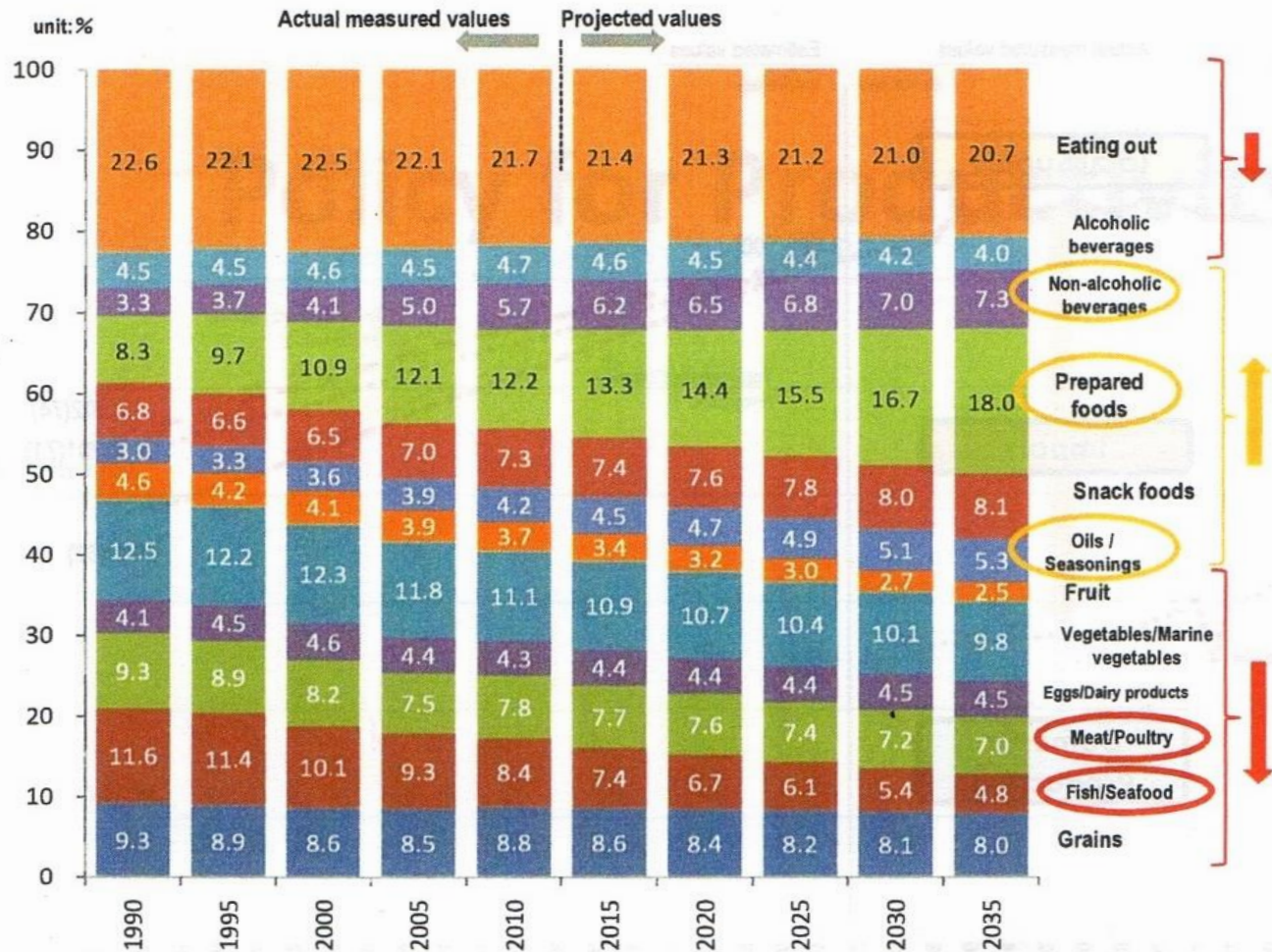
TREN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1980 – 2045



- Presentase penduduk desa semakin menurun (43%)
- Beban TK produksi pangan semakin besar (28%)
- Kebutuhan pangan di kota semakin meningkat
- Pergerakan komoditas pangan semakin besar dan jauh
- Tuntutan ketersediaan distribusi semakin besar → Agro Service



POLA KONSUMSI DAN PERILAKU KONSUMEN BERUBAH: JUMLAH & JENIS



1. Figures through 2010 are actual measured values based on the Family Expenditure Survey and the National Survey of Family Income values.
2. Percentages based on real 2010 prices.

Menurun:

- Pengeluaran keluarga menurun dalam bentuk produk segar
- Makan keluar rumah

Meningkat:

- Makan siap saji
- Cemilan

Konsekuensi:

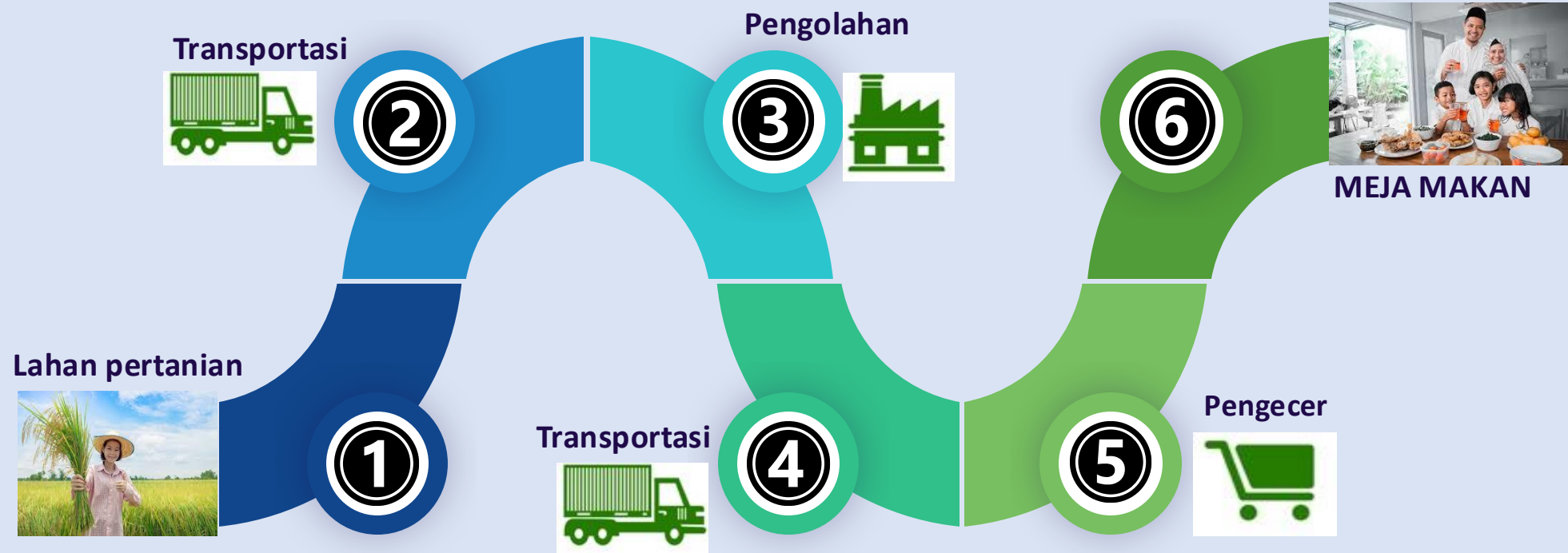
- Industri pengolahan meningkat
- Ojol semakin penting



2 RANTAI PASOK & KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH



RANTAI PASOK PANGAN : DARI LAHAN SAMPAI KE MEJA



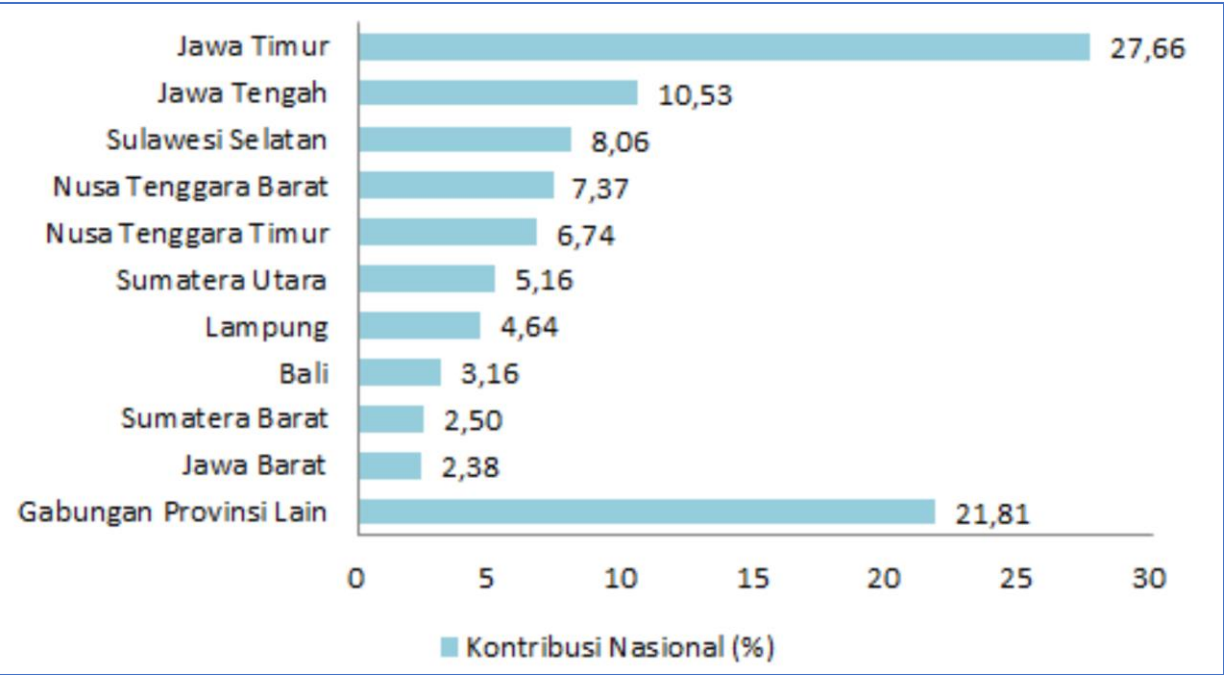
- Memberi multiplier effect yang besar
- Memberikan lapangan pekerjaan besar
- Konsumen mengakses produk lebih mudah
- Mengurangi resiko kelangkaan

- Distribusi komoditas tidak merata dan tidak tepat waktu
- biaya logistik tinggi
- Risiko kerusakan produk
- Pendapatan petani rendah
- ketahanan pangan nasional menjadi rawan

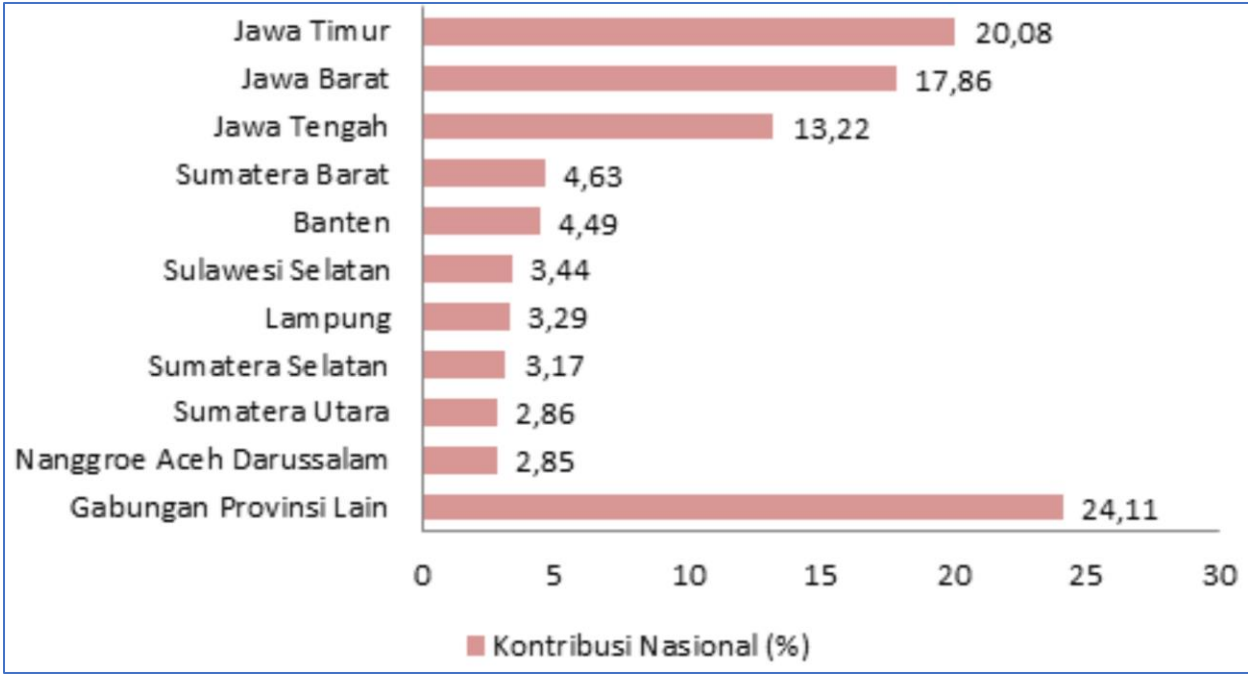


PETA POPULASI SAPI POTONG DAN PRODUKSI DAGING NASIONAL

POPULASI SAPI POTONG

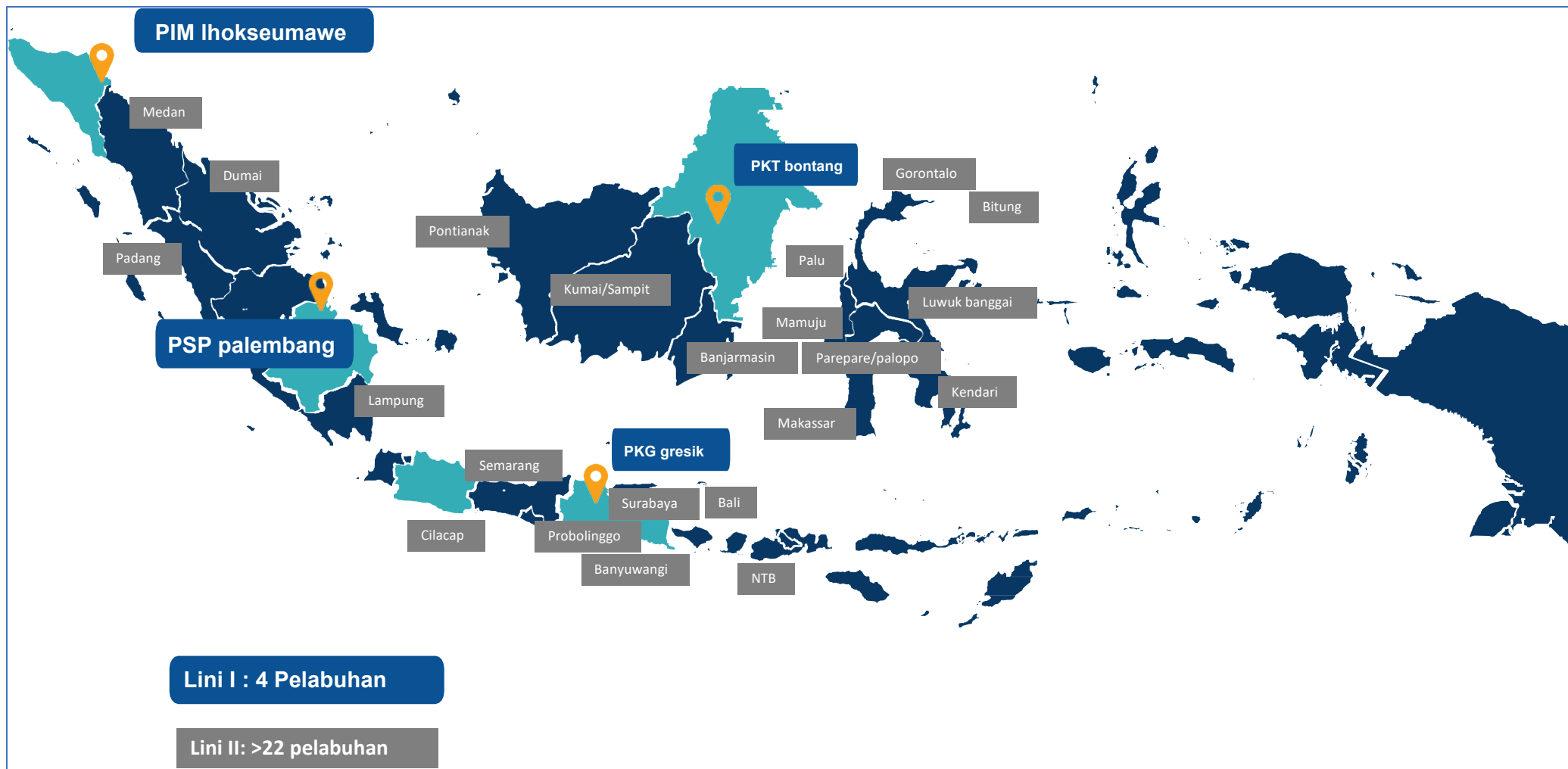


PRODUKSI DAGING SAPI





RANTAI PASOK PUPUK

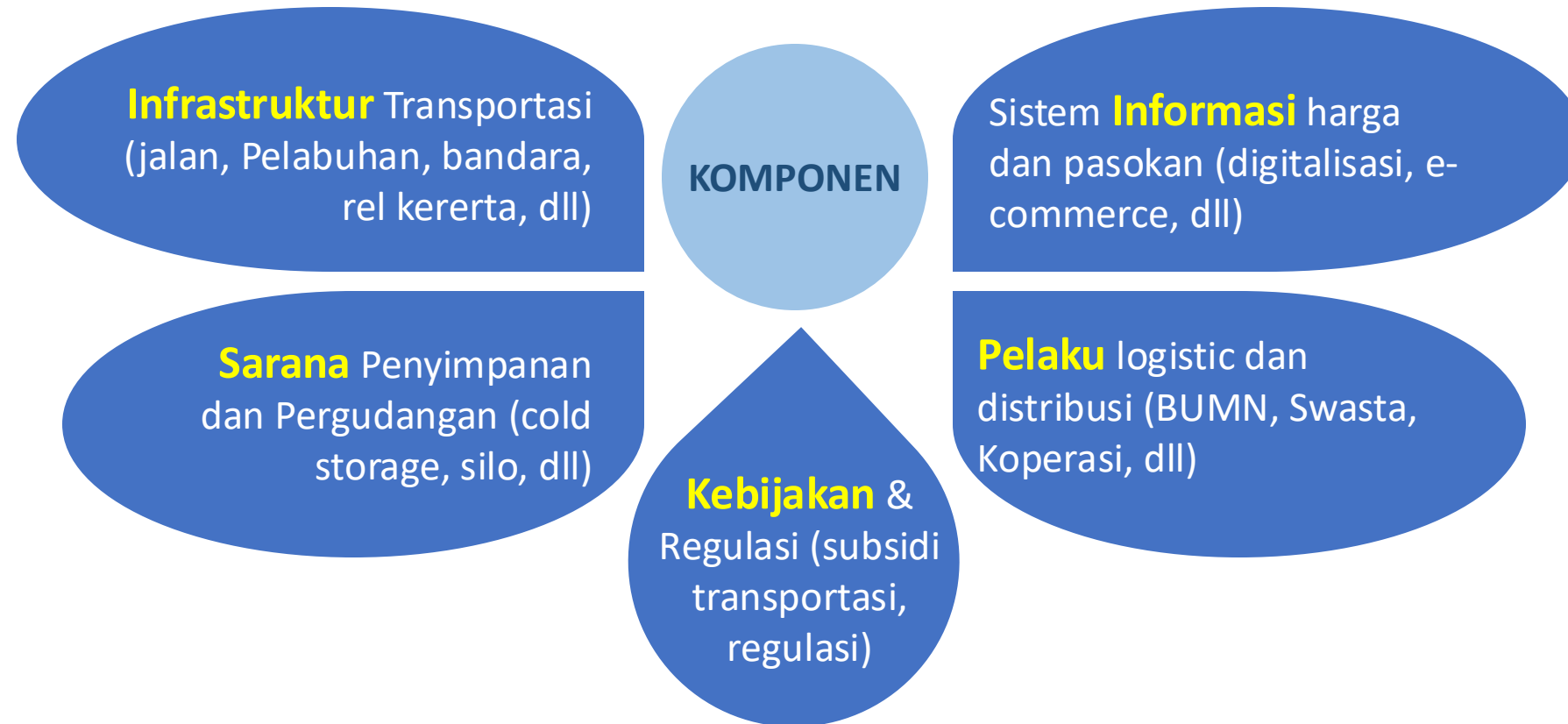




3

SISTEM LOGISTIK PANGAN NASIONAL







TUJUAN : meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan daya saing nasional

Permendag No. 57/2017:

- Mengatur standar dan tata cara pelaksanaan **kegiatan usaha logistik**, termasuk pelayanan jasa kepabeanan, pengangkutan barang, dan manajemen gudang.

Permenhub No. PM 63 / 2017:

- Mengatur pelayanan **jasa kepabeanan** di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Permenhub No. PM 83 / 2018:

- Mengatur tata cara **penyelenggaraan angkutan barang** melalui jalan, termasuk pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kendaraan.

Permenhub No. PM 104 / 2018:

- Mengatur **penyelenggaraan angkutan barang** melalui laut, termasuk persyaratan pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kapal.

Permenhub No. PM 122 / 2018:

- Mengatur tata cara **penyelenggaraan angkutan barang** melalui udara, termasuk pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan pesawat.

Permenhub No. PM 127 / 2018:

- Mengatur penyelenggaraan **angkutan barang** melalui kereta api, termasuk pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kereta api.

Permenhub No. PM 19 / 2020:

- Mengatur tata cara penyelenggaraan **angkutan barang** melalui pipa, termasuk pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan sistem pipa.

UU No. 22 / 2009:

- Mengatur berbagai aspek lalu lintas dan **angkutan jalan**, termasuk pengaturan mengenai angkutan barang.

Permendag No. 82 / 2017:

- Mengatur penyelenggaraan **logistik berbasis elektronik**.

Permasalahan

- Distribusi belum efisien dan tidak merata
- Biaya logistik tinggi
- Infrastruktur terbatas
- Sistem transportasi belum efisien dan kurang terintegrasi
- Keterbatasan SDM logistik yang kompeten
- Regulasi belum seragam dan sering tumpang tindih
- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi

Strategi

- Peningkatan Infrastruktur: pelabuhan, bandara, jalan tol, dry port.
- Digitalisasi & Integrasi Sistem Informasi: NLE, e-logistics, tracking.
- Penyederhanaan Regulasi: harmonisasi dan simplifikasi prosedur.
- Peningkatan SDM Logistik: vokasi, pelatihan, sertifikasi.
- Revitalisasi dan pembangunan pasar induk
- Peningkatan peran koperasi dalam distribusi
- Kolaborasi Multisektor: sinergi pemerintah, swasta, akademisi.

VISI

Tahun 2025

Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

MISI

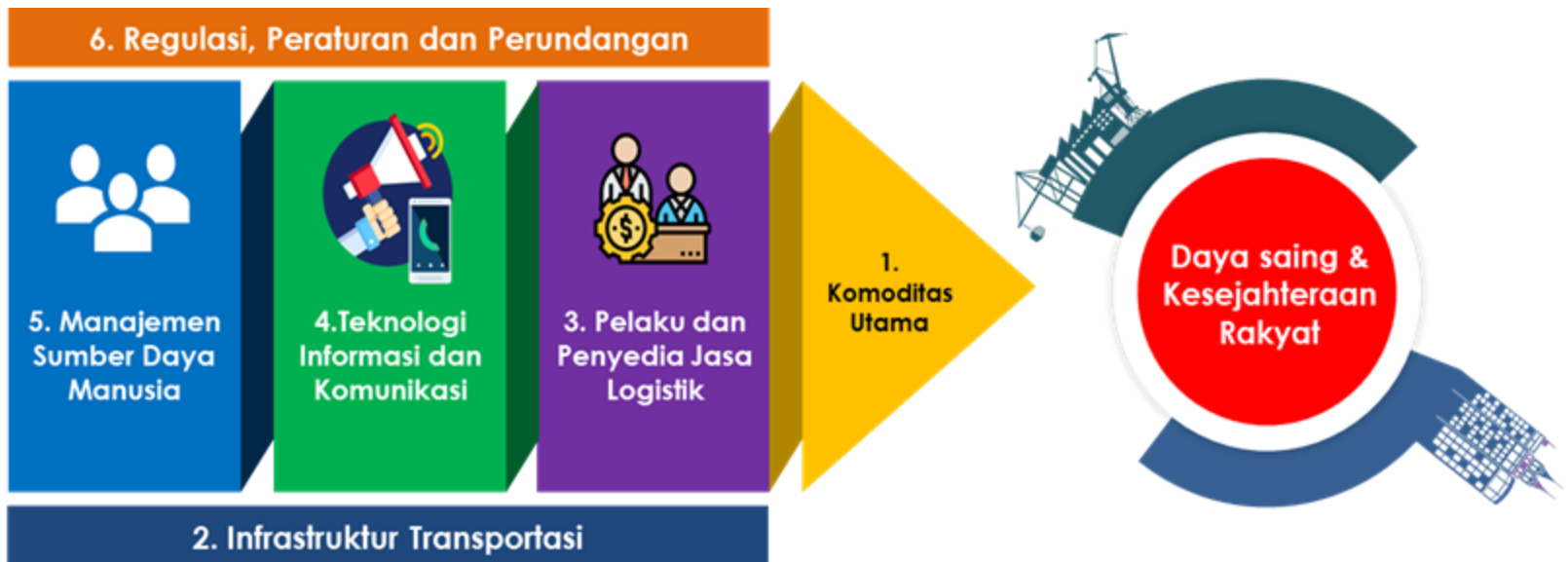
1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.
2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.

Tujuan

Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien

1. Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.
2. Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkuat kedaulatan dan keutuhan NKRI;

Pengembangan 6 (enam) Pilar yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif

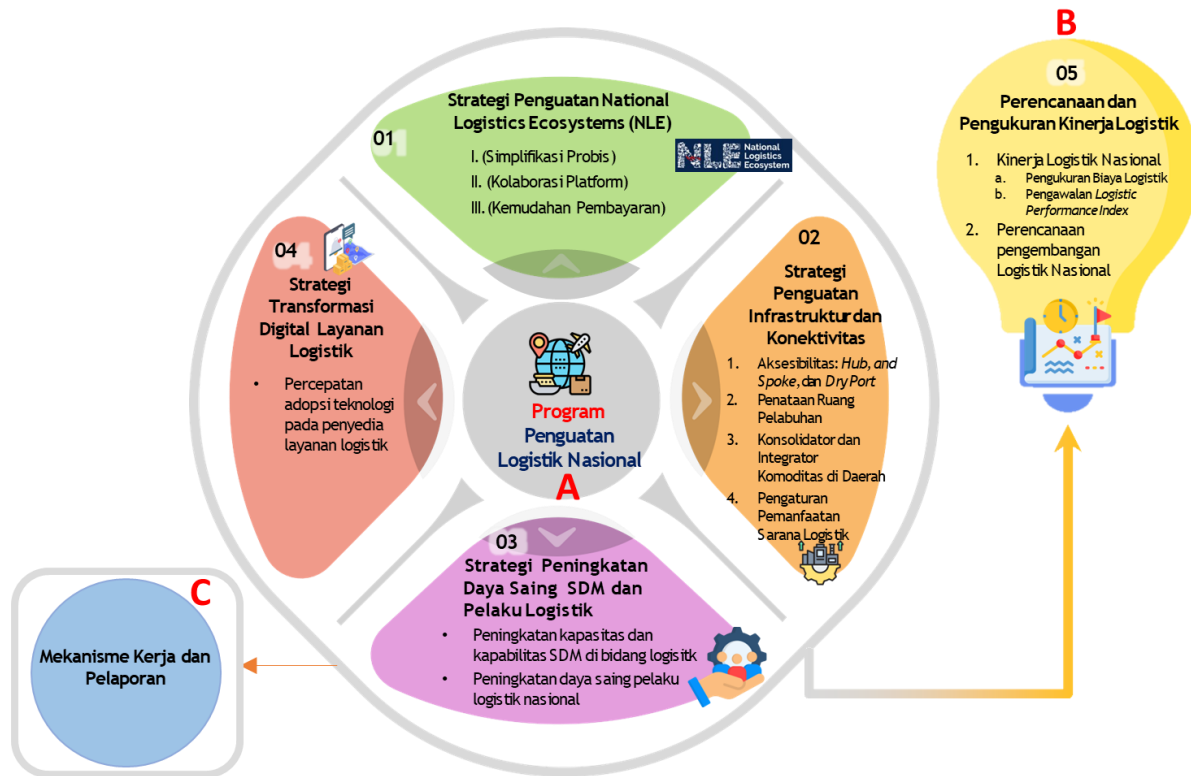




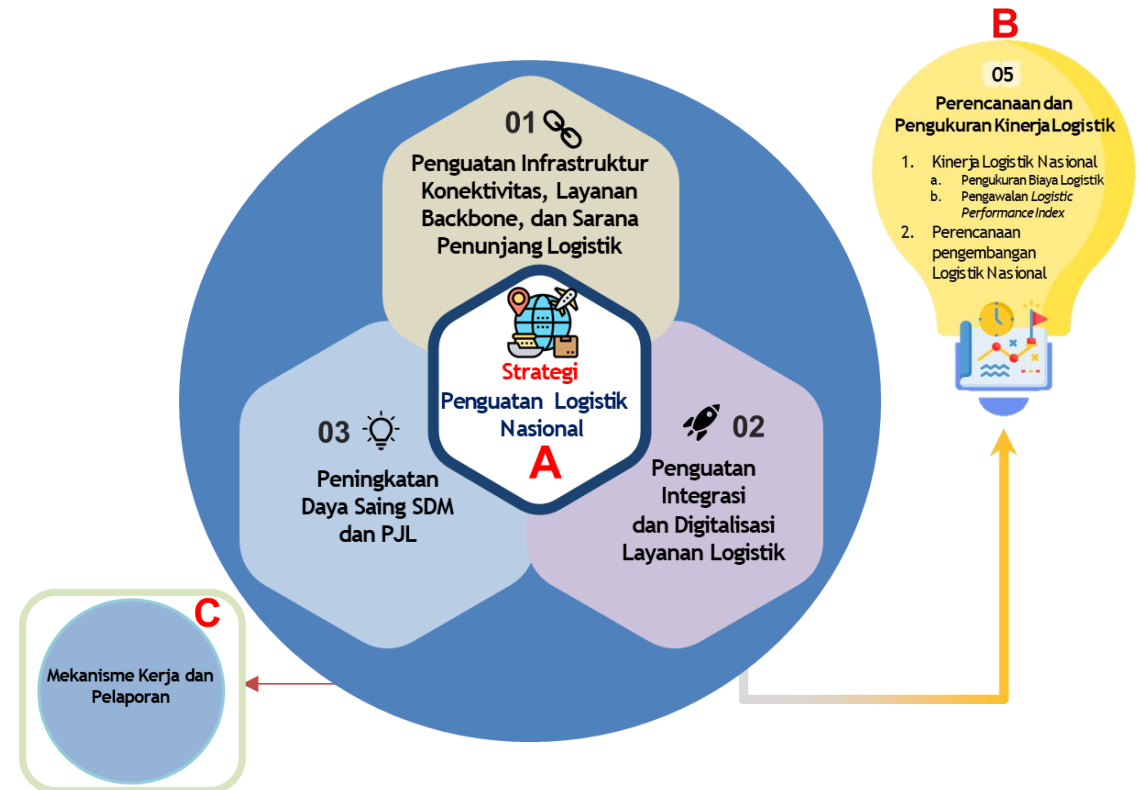
RANCANGAN PERPRES PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL

**Strategi Lama RPerpres Penguatan Logistik
Nasional Hasil Harmonisasi tanggal 12
Agustus 2024**

Kerangka Pikir RPerpres



**Usulan Perubahan Strategi RPerpres
Penguatan Logistik Nasional Hasil
Serangkaian Diskusi dan Konsultasi dengan
Kementerian PPN/Bappenas**



Catatan: Mengacu pada RPJMN 2025-2029 namun bila ada masukkan perubahan dan/atau tambahan Strategi dapat menyampaikan urgensinya.



4 GREEN AND SMART PORT (GSP)



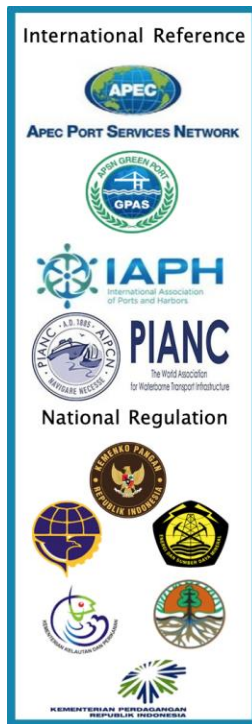
Distribusi Pangan dan Sarana Produksi pangan Sangat tergantung pada fasilitas Transportasi dan Kepelabuhanan

- Negara kepulauan
- Sentra produksi tidak semuanya sentra konsumsi
- Lima titik produksi pupuk disalurkan ke penjuru negeri
- Produk pertanian *bulky* dan mudah rusak
- Biaya distribusi produk pangan mahal (21% dari harga)



Assesment Green and Smart Port (GSP)

- Telah diberikan awarding sejak 2019, 2022, 2023, dibawah Kemenko Marves.
- Pelabuhan yang beroperasi dengan kualitas operasi terbaik (manajemen, teknis dan digitalisasi)
- Meliputi aspek Teknis, Manajemen dan Digitalisasi.
- Direncanakan assesement 2024 akan diserahkan awarding di Feb-Maret 2025.
- Referensi Internasional
- Diikutikan dalam Green Port Award System (GPAS) oleh APEC region



Program *Green and Smart Port* Bagi Pelabuhan Penyalur Pangan/Pupuk



Tujuan

1. **Pemerintah (Menko Pangan):**
Sebagai tool dalam monitoring dan evaluasi atas pemenuhan standar kepelabuhanan dan pelayaran.
2. **Operator Pelabuhan:**
 - a. Mendapatkan bimbingan teknis dalam pemenuhan standar kepelabuhanan (internasional dan nasional) dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
 - b. Mendapatkan apresiasi dari Pemerintah bila memenuhi standar dan didaftarkan untuk diexpose di level internasional (Asia-pasifik).

Manfaat Program:

1. Pelabuhan berkompetisi menghadirkan Pelabuhan yang "Green and Smart".
2. Pelabuhan menjadi memperhatikan standar pelayanan terhadap produk dan sarana pangan
3. Menghadirkan layanan distribusi pangan yang lebih baik ke depan

01 Sumber Daya Manusia

Jumlah assessor yang terbatas pada saat pelaksanaan Asesmen dan mundurnya jadwal Asesmen



02 Pelabuhan

Beberapa Pelabuhan menolak dilakukannya Asesmen dikarenakan beberapa faktor seperti :

- Anggaran
- Timeline
- Merasa belum siap



03 Teknis

Pemahaman Asesor terkait beberapa kriteria dan penilaian berbeda



Dokumentasi



04 Support K/L

Perlunya kolaborasi dari K/L seperti KLH, Kementerian BUMN, ESDM dan Kemenhub



05 Timeline

Timeline mulai pelaksanaan hingga awarding sangat ketat sehingga pelabuhan merasa waktu yang diberikan kurang untuk kegiatan Asesmen



06 Regulasi

Belum adanya regulasi selain Pokja yang mendasari Program Green and Smart Port





REGULASI

Short Term 2025

1. Draft dan Penerbitan Regulasi Kepmenko Pangan

Middle Term 2026-2027

1. Draft Peraturan Pemerintah/ Peraturan Menteri
2. Menjadi mandatory dengan sistem penilaian terintegrasi secara bertahap

Long Term 2027-2030

- Penerbitan PerMen sehingga dapat menjadi mandatory sepenuhnya yang berlaku bagi seluruh Pelabuhan

STRATEGI KEPERSERTAAN PELABUHAN

1. Pembentukan Sekretariat GSP yang fokus dalam Pelaksanaan Green and Smart Port
2. Workshop atau sosialisasi terhadap ABUPI, holding perusahaan TUKS
3. Membuat video GSP terbaru

1. Memperluas marketing channel dengan mengikuti booth seminar, memasang simbolis kepada pelabuhan yang sedang melakukan asesment, safari ke pelabuhan-pelabuhan untuk workshop

1. Sudah bersifat sustain sehingga pelabuhan yang mengkontak sekretariat untuk ikut GSP.
2. Target pelabuhan yang mengikuti GSP diatas 35 Pelabuhan dengan bertambahnya capacity asesor

PEMBENTUKAN EKOSISTEM

1. Pelabuhan yang berhasil mendapatkan hasil >80% akan didaftarkan GPAS - APEC dengan mendapat Surat Rekomendasi dari Kemenkopangan dan didaftarkan oleh IDSurvey

1. Berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dengan memprioritaskan KEMENHUB dan KLHK agar dapat di integrasikan dengan izin operasional pelabuhan ataupun menambah nilai PROPER

1. Terdapat keuntungan secara finansial yang diperoleh Pelabuhan dalam mengikuti Green and Smart Port yang dituangkan dalam regulasi



- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - Head Office
- PT Pupuk Indonesia
- PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Kabil Batam;
- PT Pelindo Terminal Petikemas TPK Semarang;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Benoa;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang;
- PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan;
- PT Pelindo Terminal Petikemas IPC TPK Tanjung Priok;
- PT Pupuk Kaltim (Persero);
- PT Pelindo Terminal Petikemas Terminal Teluk Lamong;
- PT Krakatau Bandar Samudera;
- PT Pelindo Terminal Petikemas TPK Makassar;
- PT Pelindo TPK New Makassar;
- PT Petrokimia Gresik;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Tenau Kupang;
- PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Tanjung Batu;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak - Terminal Kijing
- PT Pelindo Multi Terminal;
- PT Kaltim Kariangau Terminal;
- KSO TPK KOJA;
- New Priok Container Terminal One (NPCT1);
- TUKS PT Tunas Inti Abadi;
- TUKS PT Oil Tanking Karimun;
- PT Indonesia Kendaraan Teminal;
- PT Jakarta Tank Terminal;
- PT Krakatau Bandar Samudra;
- PT Redeco Petrolin Utama;
- SPM Soekarno Hatta PT Pertamina;
- TUKS Umum Sementara PT. Chandra Asri Pacific Tbk.
- PT Merak Chemical Indonesia
- PT Prima Terminal Petikemas
- Arion House / Pelabuhan



5 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR





Rancangan Inpres Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi

Latar Belakang

- Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045
- Mendorong swasembada pangan dan energi
- Peningkatan konektivitas jalan daerah untuk kawasan produktif dan distribusi energi

Tujuan

- Meningkatkan konektivitas jalan daerah
- Mendukung produktivitas kawasan pangan dan energi
- Mendukung distribusi hasil produksi dan energi secara efisien



INSTRUKSI KEPADA INSTANSI TERKAIT

Instruksi Umum:

- Pelaksanaan pembangunan jalan daerah terintegrasi
- Perencanaan dan penganggaran
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
- Mitigasi hambatan pelaksanaan

Kemenko Infrastruktur	Kemenko Pangan & Bappenas	Kementerian PUPR	Kemenkeu & Kemendagri	Pemda
• Sinkronisasi dan Pengendalian kegiatan • Koordinasi data lokasi jalan • Pelaporan kepada Presiden	• Koordinasi data dan lokasi • Penetapan kriteria pemilihan ruas • Verifikasi dan evaluasi • Penetapan daftar kegiatan dan pedoman pelaksanaan	• Sosialisasi dan penyusunan lokasi • verifikasi teknis • pelaksanaan pembangunan dan serah terima hasil (hibah) • evaluasi dan pengendalian	• Dukungan penganggaran sampai 2029 • Fasilitasi hibah ke Pemda • Pembinaan dan pengawasan	• Dukungan perencanaan dan anggaran • penyediaan lahan dan dokumen izin • pengoperasian dan pemeliharaan jalan pasca hibah

DBH SAWIT UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DBH Sawit bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.

- Provinsi: 20%
- Kabupaten/Kota Penghasil: 60%
- Kabupaten/Kota yang Berbatasan dengan Penghasil: 20%

Sumber Dana

Pembagian Dana



Tujuan

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil
- Kompensasi atas dampak lingkungan dan sosial
- Mendukung pembangunan infrastruktur daerah

Dasar Hukum

- PP No. 38 / 2023: Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- Permenkeu No. 91 / 2023 : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Penggunaan DBH

- **pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80%**
- Kegiatan pendukung lainnya maksimal 20%



6 **PENUTUP**





1. Rantai pasok dan sistem konektivitas antar wilayah adalah pilar penting dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
2. Dibutuhkan sistem logistik pangan yang terus berkembang untuk menghasilkan suatu system distribusi pertanian yang efektif dan berkeadilan
3. Sinergi antarpihak dan pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi pertanian yang efektif dan berkeadilan.

Terima Kasih



#PanganKita



Kemenkopangan.go.id



@Kemenkopangan.ri